

## DAFTAR PUSTAKA

### • Buku

- Sulistiowati, 2013, *Tanggung Jawab Hukum pada Perusahaan Group di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Salim HS, Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Frank, Jerome, 2013, *Hukum dan Pemikiran Modern, Nuansa Cendekia*, Bandung.
- Mahfud MD, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sidharta, Arief. 2015, *Refleksi tentang Hukum, Citra Aditya Bakti*, Bandung.
- Effendy, Marwan. 2014, *Teori Hukum dari prespektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*, Jakarta.
- Nadadap, Binoto. 2016, *Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Undang Undang No. 40 tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta
- Supranoto, Datot. 2009, *Hukum Perseroan Terbatas (edisi revisi 2009)*, Djambatan, Jakarta.
- Afrizal, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rangkuti, Freddy. 2016, *SWOT, Balanced Scorecard*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT Grasindo
- Mertokusumo, Sudikno. 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, , Gramedia Pustaka Tama, Jakarta.
- Afrizal, *Metode*, 2010 *Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Raja Grafindo Persada. Jawa Barat.
- Raharjo, Sutjipto. 2002, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Franz Magnis-Suseno, 1999, *Etika Politik (Prinsip-prinsip Moral Dasar KeNegaraan Modern)*, PT GramediaPustaka Utama, Jakarta.
- Franz Magnis-Suseno, 1997, *Mencari Sosok Demokratis (Telaah Filosofis)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Frnaz Magnis-Suseno, 1995 *Filsafat Kebudayaan Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ritzer, George. dan Douglas J. Goodman, 2007, *Teori Sosiologi Modern (Modern Sociological Theory*, Diterjemahkan oleh Alimanda, Prenada, Jakarta.
- Fajar, Mukti. ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Meuwissen, 2008 *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Refika Aditama, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 1997, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember.
- Disarikan dari bahan kuliah Philipus M. Hadjon, 1997 *Dalam Mata Kuliah Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Pada Program Megister Hukum Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya.

- Admosudirjo, Prajudi. 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta.
- Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Pranadamedia Groub, cet-ke 6, Jakarta
- HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht*, Vugas'Gravenhage, hal.129, Dikutip dari Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta.
- F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan HR. 2006, "*Hukum Administrasi Negara*", RajaGrafindo Persada, Jakarta.

#### • Artikel Jurnal

- Alian. 2012, *Metodologi Sejarah dan Iplementasi dalam Penelitian*, Jurnal, Universitas Brawijaya.
- Susanto, 2006, *Dasar-dasar Penelitian Sejarah*, Depdiknas: Pusat Pengemangan Penantaran Guru IPS dan PMP, Malang.
- Mahpud Sujai, 2011, "*Evaluasi Kritis Terhadap Kebijakan Subsidi Listrik Pada Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero)*", Widyariset, Vol. 14 No.1, 2011.
- Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan Jhon Rawls*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, April 2009.
- Lukman Hakim, *Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Puskasi Fh Universitas Widyagama Malang, *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No.1, Juni 2011
- Agus Suryono, *Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*, Volume Vi, Nomor 02, September 2014.
- Nur Fadrijh Asyik, *Political-Economy Accounting Perspective: Landasan Baru Pemberdayaan BUMN*, *Jurnal Investasi*, Vol. 6, No. 1, 2010.
- Fiskal.kemenkeu.go.id/.*Mencermati Kebijakan Public Service Obligation pada BUMN*, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2009/02/16/114545-mencermati-kebijakan-public-service-obligation-pada-bumN>, diakses pada 18 Septeber 2020
- "Pendapat Allan Green Span, Mantan Gubernur Federal Reserve System (The FED) dalam Dedie S. Martadisastra", *Togar Tanjung, Persaingan Usaha dan Peran Pemerintah*, dalam <http://law.ui.ac.id/v2/buletin/opini/67-persaingan-usaha-dan-peran-negara> diakses pada 22 Agustus 2020.
- Eilperin, Juliet; Entous, Adam (2016-12-31). "*Operasi Rusia meretas sebuah utilitas Vermont, menunjukkan risiko terhadap keamanan jaringan listrik AS, kata para pejabat*". *The Washington Post*. ISSN 0190-8286
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, Tanpa Tahun.
- Douris, Constance (2018-01-16). "*Karena Ancaman Cyber Meningkatnya Jaringan Listrik, Utilitas Dan Regulator Mencari solusi*"

Philipus M Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998.

Pieter E Latumeten, *Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep "Volmacht Dan Lastgeving" Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Universitas Indonesia, Vol. 41 tahun ke 1, 2017.

Anna Maria Tri Angraini, 2013, *Sinergi BUMN dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam Prespektif Persaingan Usaha*, Mimbar Hukum Volume 25, Komisi Persaingan Usaha.

Catur Septiana Rakhmawati, S.H., 2016, *Implementasi Peraturan Menteri Bumn Nomor Per-15/Mbu/2012 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang Dan Jasa Bumn Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Business Law Review Vol. 2, Universitas Islam Indonesia.

- **Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

Richo Andi Wibowo, Pencegahan Maladministrasi dalam Pengadaan Umum di Indonesia Pendekatan Hukum Pengadaan Publik Yang Baik Dan Perbandingannya Dengan Negara Belanda Dan Inggris, desertasi,.....

Andi Rakhman Dira, 2019, Prinsip Efektif Dan Prinsip Efisien Dalam Penggabungan Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction Dan Operation & Maintenance Konstruksi Pengadaan Pusat Listrik Di Pt Pln (Persero), Tesis, Universitas Gadjah Mada, Jakarta.

- **Dokumen Perusahaan**

Akta Pendirian PT PLN (Persero) dan Perubahan Terakhir

Akta Pendirian PT Haleyora Power dan Perubahan Terakhir.

Kompilasi Anggaran Dasar PT PLN (Persero) – SHK PT PLN (Persero)

PT PLN (Persero), 2017, *Annual Report "Inspiring journey of Our Sustainable Development"*, Jakarta.

PT PLN (Persero), 2016, *Annual Report "Listrik untuuk Membangun dan Mensejahterakan"*, Jakarta.

PT Haleyora Power, 2019, *Annual Report*, Jakarta.

Surat Keputusan Direksi Nomor 459.K/DIR/2012 Tantang Pengamanan Layanan Operasi dan Pemeliharaan Bidang Transmisi dan Distribusi tenaga Listrik.

Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 500.K/DIR mengatur tentang penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dalam bentuk pemborongan pekerjaan.

Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 734.K/DIR/2013 tentang Pengamanan Layanan Operasi dan Pemeliharaan untuk Bidang Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik.

Peraturan Direksi PT PLN (Persero) nomor 0100.P/DIR/2019 tentang Manajemen Kinerja Korporasi dan Penilaian Kinerja Organisasi.

Peraturan Direksi PT PN (Persero) Nomor 0022.P/DIR/2020, Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan jasa.

Perjanjian Kerjasama Strategis antara PT PLN (Persero) dengan PT Haleyora Power, Nomor 0037.PJ/040/DIR 2014 – 007.PJ/613/DIR-HP/2014, Tentang Pengamanan

## Layanan Operasi dan Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik di Lingkungan PT PLN (Persero).

- **Internet**

<https://www.pln.co.id/>  
<https://www.haleyorapower.co.id/>  
<https://www.hukumonline.com/>  
<https://www.sciencedirect.com/>  
<https://www.kbbionline.com/>  
<https://www.youtube.com/>

- **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berikut dengan Penjelasannya

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R Subekti dan R Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramiita, 1992),

Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Lembaran Negara Nomor 3817).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, (Lembaran Negara Nomor 4169).

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Nomor 5326).

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0009 Tahun 2005, Tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik Dan/Atau Sewa Menyewa Jaringan Usaha Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.

- **Putusan Pengadilan**

Pengadilan Negeri Jember, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2011/PN.Jb., dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa pencabutan kuasa oleh pemberi kuasa dapat dilakukan secara sepihak, bahkan dengan pemberian kuasa baru kepada orang lain, dengan sendirinya kuasa yang lama menjadi berakhir.